

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era kolonialisme Belanda, Islam dianggap sebagai ancaman. Eksistensi pesantren dalam perkembangannya terus dihalangi hingga mengalami kesulitan untuk berkembang. Arah gerak pesantren terus dibatasi oleh pihak Belanda, misalnya pada tahun 1882 dibentuk “*Pristeranden*” (badan pengawas yang meninjau kehidupan pesantren dan pendidikan agama di dalamnya).<sup>1</sup> Implikasi atas berdirinya badan ini terhadap pesantren adalah pada tahun 1905 pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah peraturan bahwa setiap pengajar (mengisi pengajian atau pelajaran keagamaan) harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum mengajar.<sup>2</sup> Peraturan tersebut kemudian dikenal dengan istilah ordonasi 1905.<sup>3</sup> Pada permulaan awal abad ke-20 mulai muncul organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam. Al-Irsyad, Nahdatul Wathan dan yang lainnya. Keberadaan organisasi-organisasi ini dianggap sebagai penghalang oleh Belanda sehingga muncul peraturan kembali. Pada tahun 1925 Belanda membatasi kyai dalam mengajar (mengaji), dalam artian tidak semua kyai diberi izin untuk mengajar.<sup>4</sup>

Selain itu pada tahun 1932 ada peraturan lain yang bernama Ordonasi Sekolah Liar atau *Widle School Ordonatie* (aturan yang berusaha untuk menutup

---

<sup>1</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2006), 12.

<sup>2</sup> Zyharini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 148.

<sup>3</sup> Mujamil Qomar, loc.cit

<sup>4</sup> Zyahrini, loc.cit.

madrasah dan menumpasnya serta sekolah-sekolah yang tidak memiliki izin atau terdapat pelajaran yang tidak disukai oleh pihak Belanda. Adapun latar belakang lahirnya Ordonasi Sekolah Liar karena mulai muncul gerakan nasionalisme-Islamisme atau Sumpah Pemuda pada tahun 1928.<sup>5</sup>

Era penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia terabaikan. Banyak murid yang secara paksa mengikuti aturan-aturan Jepang, seperti menjadi romusha, baris berbaris bahkan bernyanyi. Namun, dapat dikatakan bahwa keberadaan madrasah dirasa sedikit beruntung karena masih dalam lingkungan pesantren sehingga pemerintah Jepang tidak bisa mengawasinya secara langsung. Proses pendidikan madrasah juga masih bisa berjalan sedikit normal.<sup>6</sup>

Pada masa kemerdekaan terdapat perubahan terhadap eksistensi pesantren dimana pesantren memiliki kebebasan, keterbukaan dan demokratis dalam sistem pendidikan.<sup>7</sup> Setelah kemerdekaan, proses pendidikan berjalan semakin harmonis karena ambisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mampu tersalurkan melalui kebebasan ini. Meskipun pada saat itu madrasah-madrasah sudah banyak diminati, justru hal ini yang mejadi tantangan bagi pesantren untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Era ini dianggap sebagai bencana yang mengancam keberadaan pesantren. Namun, hanya pesantren-pesantren besar mampu menghadapi keadaan tersebut dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan sistem pendidikan

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 151

<sup>7</sup> Mujamil Qomar, op.cit. 10.

nasional. Hal ini yang membuat pesantren-pesantren kecil pada tahun 1950-an mulai meredup dan mati.<sup>8</sup>

Masa kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan periode yang cukup paradoks terutama dalam menyikapi pesantren pada wacana politik Islam. Pesantren seringkali didekati kemudian dimanfaatkan guna menciptakan legitimasi yang kokoh secara struktural khususnya pada waktu menjelang pemilu. Pada saat itu misalnya partai 'Golkar' yang merupakan partai pemerintah yang melakukan pendekatan terhadap Islam. Namun, disisi lain justru rezim Orde Baru tidak gentar dalam menghadapi gerakan-gerakan politik yang berakar atau muncul dari lembaga pendidikan Islam sendiri. Keadaan ini lebih tepatnya dikatakan sebagai periode dinamis yang terus berlanjut hingga jatuhnya Orde Baru.<sup>9</sup>

Pergeseran kepemimpinan dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie (1998-1999) merupakan masa transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi. Lahirnya era Reformasi menjadi jalan dalam membuka tirai ideologis, dan tak kalah penting telah memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok sosial yang ada kala itu. Dampaknya, terjadilah tarik menarik diantara kepentingan sosial politik yang lama dengan komposisi baru adanya partai-partai Islam. Munculnya partai-partai Islam ini merupakan hasil dari transfigurasi ormas Islam yang menjadi partai politik. Secara tidak

---

<sup>8</sup> Ibid, 14

<sup>9</sup> Anjar Nugroho, *Pergulatan Politik Pesantren Era Reformasi (Studi Interaksi Pesantren Dengan Partai Politik Di Kab. Banyumas)*, Jurnal Review Politik Vol. 07 No. 01, 2017, hlm. 76

langsung, hal ini kemudian juga memberikan dampak terhadap pesantren-pesantren yang secara kultural ‘independen’ tetapi masih memiliki potensu guna memobilisasi politik.<sup>10</sup>

Munculnya partai-partai politik dari rahim ormas Islam memulai eksistensi baru bagi perpolitikan Islam di Indonesia. Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari NU, Partai Amanat Nasional (PAN) dari Muhammadiyah, dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai perwujudan dari partai Masyumi. Di samping itu, munculnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan buah dari aliansi yang didominasi oleh NU dan MI pada masa Orde Baru. Partai-partai politik ini kemudian mempunyai peluang guna melakukan gerakan-gerakan politiknya melalui pesantren. Pada waktu yang bersamaan, pesantren dapat menunjukkan pluralitas dalam menyikapi pilihan-pilihan politiknya, baik itu pilihan partai politik maupun ideologinya.<sup>11</sup>

Pada masa orde baru, kehidupan pesantren mulai menemukan titik terang setelah melewati persaingan atas lahirnya sistem pendidikan nasional. Persaingan tersebut bermula ketika mulai menjamurnya pendirian sekolah-sekolah yang justru mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>12</sup> Banyak orang tua yang mengirim anaknya ke madrasah maupun pesantren. Akan tetapi, anggapan sosial yang dapat diterima apabila memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini yang menyebabkan

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah dan Sekolah Pendidikan: Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1991), 208.

munculnya anggapan masyarakat bahwa pesantren tidak memiliki efek sipil.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, tidak sedikit pesantren yang mengemukakan keluhan atas program Departemen Agama tersebut karena sulit untuk menyesuaikan diri, terutama bagi pesantren-pesantren kecil. Dapat dikatakan bahwa hanya pesantren-pesantren besar yang mampu mengikuti program Departemen Agama dengan turut mendirikan madrasah.<sup>14</sup>

Beberapa pihak yang mendukung didirikannya madrasah yang disertai dengan pendidikan umum, menolak secara tegas adanya pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Misalnya penolakan tersebut timbul dari kaum reformis yang memiliki tujuan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dimana ilmu agama dengan aspek-aspek kehidupan lainnya masih selaras.<sup>15</sup> Upaya pembaharuan bermula ketika Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk stukturisasi dan formalisasi madrasah. Misalnya kebijakan yang termaktub dalam Pasal 1 TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 menetapkan bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari mata pelajaran di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah pada masa Orde Baru telah berupaya untuk membuat stukturisasi dan formalisasi pada madrasah.<sup>16</sup>

Pada tahun 1970-an madrasah kembali mengalami tantangan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasa mengisolasi madrasah dari sistem pendidikan nasional sehingga arah geraknya terbatas.

---

<sup>13</sup> Ibid, 213-214.

<sup>14</sup> Ibid, 215.

<sup>15</sup> Ibid, 23

<sup>16</sup> Anin Nurhayati, *Fenomena Madrasah Pasca Skb 3 Menteri Tahun 1975 Dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam*, Jurnal Ta'allum Vol. 01 No. 2, 2013, 134.

Misalnya, dikeluarkannya kebijakan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan. Lahirnya kebijakan ini membuat banyak kalangan umat Islam dan organisasi-organisasi berbasis pendidikan merasa gelisah dan keberatan atas kebijakan tersebut karena dianggap menghilangkan wewenang yang dimiliki Kementerian Agama dalam bidang pendidikan. Akibat banyaknya aspirasi dari berbagai pihak terkait kebijakan tersebut, maka pemerintah berupaya menyikapinya dengan mengeluarkan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975 yang berisi tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah”. SKB 3 Menteri ini lahir pasca diadakan sidang kabinet yang menghasilkan kesepakatan oleh tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan SKB 3 Menteri memuat 3 poin penting diantaranya:

- 1) Penyetaraan Ijazah, yaitu ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum sederajat.
- 2) Bagi lulusan madrasah bisa meneruskan ke jenjang sekolah umum yang sederajat lebih di atasnya.
- 3) Bagi lulusan madrasah bisa pindah ke sekolah umum yang sederajat mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.<sup>17</sup>

Dikeluarkannya SKB 3 Menteri dirasa sebagai permulaan modernisasi pada madrasah dan melahirkan dualisme pendidikan dimana pendidikan agama

---

<sup>17</sup> Mohamad Faoji, Loc.Cit. hlm. 11-12.

dan pendidikan umum tidak lagi mengalami kontradiksi.<sup>18</sup> Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom merupakan dua diantara sekian banyak pesantren yang ada di kecamatan Cileunyi. Namun pada penelitian kali ini, penulis memilih Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom sebagai objek penelitian karena kedua pesantren ini berdiri sebelum kemerdekaan. Hal menarik yang membuat penulis mengangkat kedua pesantren ini sebagai objek penelitian adalah Pesantren Al-Jawami sampai sekarang masih berdiri dan bertransformasi mengikuti kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975 dengan mendirikan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dua tahun berturut-turut setelah lahirnya kebijakan tersebut.

Disisi lain, Pesantren Nailul Kirom tetap berdiri secara konsisten dengan mempertahankan eksistensinya tanpa bertransformasi mendirikan madrasah atau sekolah formal. Namun, masih sedikit tulisan yang membahas mengenai SKB 3 Menteri tahun 1975 dan kaitannya dengan pesantren. Meskipun dalam beberapa literatur telah ada tulisan tentang SKB 3 Menteri tahun 1975 serta implikasinya terhadap perkembangan madrasah. Maka hal ini yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam tentang respon pesantren terhadap SKB 3 Menteri tahun 1975.

Disamping itu alasan penulis membatasi waktu penelitian dari tahun 1977 hingga tahun 2022 adalah:

---

<sup>18</sup> Ibid, 135.

- 1) Tahun 1975 SKB 3 Menteri baru diterbitkan, Adapun tahun 1977 merupakan terjadinya peristiwa atau momen penting yaitu pendirian Madrasah Aliyah (MA) Al-Jawami.
- 2) Tahun 2022 merupakan tahun Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom masih berdiri, atau dapat dikatakan bahwa kedua pesantren ini masih eksis hingga sekarang. Rentan waktu sejak 1977-2022 penulis menggunakan pendekatan teori kausalitas sejarah (sebab-akibat) tentang respon Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom terhadap SKB 3 Menteri tahun 1975. Perbedaan respon kedua pesantren ini memberikan akibat maupun dampak bagi eksistensi pesantren baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun segi infrastruktur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintahan tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975?
2. Bagaimana respon atau sikap Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom terhadap SKB 3 Menteri tahun 1975?
3. Bagaimana pengaruh respon Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom terhadap SKB 3 Menteri tahun 1975 terhadap eksistensi pesantren?

## **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun tujuannya ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan pemerintahan tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975.
2. Menganalisis respon atau sikap Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom terhadap SKB 3 Menteri tahun 1975?
3. Menganalisis pengaruh respon Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom terhadap SKB 3 Menteri tahun 1975 terhadap eksistensi pesantren?

#### **D. Kajian Pustaka**

Penulis menelusuri berbagai literatur terkait kajian yang dipandang relevan dengan objek penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian tesis oleh Wandi yang berjudul “Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam, Madrasah Al-Khairiyah Di Kota Jambi 1972-2017 (Analisis atas SKB 3 Menteri tahun 1975 tentang Pengembangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi)”. Dalam tesis ini menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada Madrasah Al-Khairiyah di Kota Jambi setelah turunnya keputusan pemerintah SKB 3 Menteri. Perubahan tersebut terjadi pada sistem pendidikan yang meliputi tenaga kerja, kurikulum dan pembagian kelas yang ditata secara teratur.

*Kedua*, Jurnal penelitian karya Anin Nurhayati yang berjudul “Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri tahun 1975 dan Implikasinya terhadap dunia pendidikan Islam”. Pada jurnal ini menjelaskan tentang fenomena pendidikan Islam di Indonesia sebelum dan sesudah keluarnya kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975. Kebijakan tersebut dianggap sebagai tonggak awal dalam sejarah

madrasah yang menjadikannya setara dengan sekolah umum serta adanya pengakuan secara yuridis oleh pemerintah.

*Ketiga*, penelitian tesis oleh Muhamad Aliman yang berjudul “Model Khitabah K.H. Imang Abdul Hamid (Studi Deskriptif Tentang Model Khitabah K.H. Imang Abdul Hamid di Ponpes Sindangsari Al-Jawami Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”. Tesis ini membahas tentang model khitabah yang digunakan oleh KH. Imang Abdul Hamid sebagai pimpinan pesantren sekaligus mubalig, baik itu ketika memberikan pengajaran kepada santri maupun dalam pengajian-pengajian.

Beberapa penelitian diatas berbeda dengan objek yang akan penulis bahas. Akan tetapi terdapat persamaan topik, yaitu mengenai kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975. Secara lebih rinci akan dibahas sebagai berikut:

- 1) Tesis karya wandi membahas tentang perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Madrasah Al-Khairiyah di Kota Jambi, sedangkan penelitian ini membahas tentang respon Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom di Kecamatan Cileunyi terhadap SKB 3 Menteri. Dengan demikian, penelitian tesis diatas berbeda topik dan objek pembahasan dengan apa yang penulis teliti.
- 2) Terkait Pembahasan tentang jurnal karya Anin Nurhayati tentang fenomena dan implikasi madrasah pasca dikeluarkannya kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975 hanya berfokus pada dinamika madrasah sebagai sekolah agama.

- 3) Skripsi karya Muhamad Aliman tentunya berbeda dengan pembahasan penulis. Tesis tersebut berkaitan merupakan objek kajian komunikasi sedangkan penelitian penulis merupakan objek kajian sejarah.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, tepatnya sejarah pendidikan. Maka dari itu, dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah. Terdapat empat tahapan dalam penelitian sejarah, diantaranya adalah heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah).

### 1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metode sejarah. Adapun heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*heuristiken*" yang artinya mengumpulkan sumber. Korelasinya dengan sejarah adalah sumber yang dimaksud yakni sumber sejarah baik itu berupa kesaksian, catatan maupun fakta-fakta lain yang memuat penggambaran mengenai terjadinya suatu peristiwa yang menyangkut manusia. Inilah yang dimaksud dengan sumber sejarah. Maka dari itu, seorang sejarawan tidak bisa menulis sejarah apabila tidak memiliki sumber sejarah.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini, penulis menemukan sumber-sumber yang dijadikan sebagai referensi atau rujukan. Sumber-sumber tersebut ialah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan kesaksian dari seseorang yang sejaman dengan peristiwa sejarah yang

---

<sup>19</sup> M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 219.

dikisahnya atau orang yang menyaksikan secara langsung atau melalui alat mekanis misalnya diktafon.<sup>20</sup> Dalam proses pengumpulan sumber, penulis melakukan penelusuran dengan observasi ke Pesantren Al-Jawami, Pesantren Bustanul Wildan dan Pesantren Nailul Kirom yang memuat data-data guna mendukung penulisan makalah ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak terkait dan memperoleh sumber berupa kesaksian orang-orang tentang respon mereka terhadap kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975.

Adapun sumber sekunder ialah kesaksian dari seseorang yang tidak sejaman atau tidak menyaksikan secara langsung peristiwa sejarah (sumber lisan). Maka dari itu penulis berusaha mengumpulkan sumber sekunder berupa buku maupun jurnal artikel yang terkait dengan topik yang dibahas.

Dalam menggali informasi untuk topik yang dibahas, penulis dalam metode sejarah menggunakan metode sejarah lisan. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini sumber primer yang dibutuhkan ialah sumber lisan. Sebagaimana definisi sejarah lisan menurut para ahli ialah sebagai berikut:

Sartono Katodirdjo mengartikan bahwa sejarah lisan merupakan cerita-cerita atau pemahaman kolektif yang disampaikan secara lisan.

A. Adaby Darban merumuskan sejarah lisan sebagai salah satu sumber sejarah yang ada pada seseorang yang menjadi saksi sejarah atau

---

<sup>20</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, ter. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1973), 35.

mengikuti atau menyaksikan kejadian pada masa lampau yang dipaparkan melalui lisan.<sup>21</sup>

Definisi Sejarah lisan menurut A. Gazali Usman ialah sebagai rekaman pita yang berasal dari wawancara yang dialami secara langsung oleh pengkisah atau narasumber. Sederhananya isi rekaman tersebut berupa hasil wawancara antara pewawancara dengan pengkisah atau narasumber.

Tidak jauh berbeda dengan A. Gazali Usman, A.B Lopian juga mendefinisakan sejarah lisan sebagai *tape recording* atau rekaman pita hasil dari wawancara terkait peristiwa sejarah baik itu ingatan tentang pengalaman-pengalaman pengkisah maupun hal-hal yang dialami secara langsung oleh pengkisah.<sup>22</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pengertian sejarah lisan menurut beberapa ahli diatas, dapat dikatakan bahwa sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah yang berupa memori atau ingatan manusia. Maka tidak ada sejarah lisan tanpa adanya ingatan manusia.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengkisah yang sebelumnya telah melalui tahap seleksi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Secara lebih rinci penulis mengklasifikasikan sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Reiza D. Dienputra, *Sejarah Lisan: Konsep dan Metode* (Bandung: M. Nor Books, 2006), 12

<sup>22</sup> Ibid, 47. Pengkisah adalah seseorang yang menjadi saksi hidup yang diwawancarai untuk menceritakan kesaksiannya yang direkam melalui alat rekaman,

## a. Sumber Primer

### Sumber Lisan

- 1) Wawancara dengan K.H Imang Abdul Hamid selaku pimpinan Pesantren Al-Jawami pada tanggal 10 November 2022.
- 2) Wawancara bapak Ayi Muammar selaku keluarga Pesantren Al-Jawami sekaligus kepala sekolah MTsS Al-Jawami pada tanggal 10 November 2022.
- 3) Wawancara dengan K.H. M. Kholilullah selaku pimpinan Pondok Pesantren Nailul Kirom pada tanggal 5 November 2022.
- 4) Wawancara dengan bapak Tutep Muhammad Mukhtar selaku putera alm. Kyai Agus Badrudin (pimpinan Pondok Pesantren Nailul Kirom generasi kedua) tanggal 26 Januari 2023.
- 5) Wawancara dengan Ibu Didah Faridah selaku kepala sekolah MA Al-Jawami tanggal 27 Januari 2023.
- 6) Wawancara dengan Ceng Uun Sulaiman Fatkhurrahman tanggal 29 Mei 2023.

### Sumber Dokumen

- 1) Berita Acara Pemilihan Pimpinan Pondok Pesantren Pengkolan Nailul Kirom, 13 Mei 2012.
- 2) Dokumen Hasil Musyawarah Ahli Waris H. Sulaiman Naksabandiyah Tentang Pengelolaan Pesantren, 20 Mei 1988.

- 3) Dokumen Surat Keputusan Nomor: B.002/YPI-SULAIMANIYAH/VII/2013 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Sulaimaniyah.
- 4) Profile Madrasah Aliyah Al-Jawami Cileunyi Bandung, Yayasan YAPATA Al-Jawami Bandung Tahun 2022/2023.

#### **b. Sumber Sekunder**

##### **Artikel Jurnal**

- 1) Anin Nurhayati, "Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri tahun 1975 dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam" Jurnal Ta'allum I, No. 2 (2013), 133-144.
- 2) Haidar Ali, dkk, "Desain Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Sindangsari Al-Jawami Cileunyi Bandung Dalam Menghadapi Generasi Milenial" Jurnal Tarbawi 16, No. 1 (2019), 15-31.

##### **Skripsi**

- 1) Muhamad Aliman, "MODEL KHITABAH K.H. IMANG ABDUL HAMID (Studi Deskriptif Tentang Model Khitabah K.H. Imang Abdul Hamid di Ponpes Sindangsari Al-Jawami Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)" Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- 2) Mohammad Hasby Assidik, "Peran K.H. Muhammad Sudja'i Dalam Dakwah Islam Di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 1931-1983" Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.

## 2. Kritik

Langkah selanjutnya setelah tahapan heuristik adalah kritik sumber. Kritik terbagi menjadi dua bagian, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai autensitas atau keabsahan sumber sejarah. Adapun kritik internal dilakukan untuk mengetahui apakah sumber tersebut shahih (kredibel).<sup>23</sup>

Dalam tahapan kritik, penulis berupaya untuk mengkritisi dan melakukan penyaringan terhadap sumber-sumber sejarah yang telah di peroleh pada tahapan heuristik. Sumber tersebut ialah sumber primer berupa sumber lisan dan sumber sekunder berupa tesis dan artikel jurnal.

### a. Kritik Eksternal

Pada tahapan kritik eksternal, sebagaimana menurut Taufik Abdullah, terdapat tahapan-tahapan kritik ekstern ialah kritik mengenai profil pengkisah, kritik mengenai ada atau tidak kaitan pengkisah dengan peristiwa yang ia kisahkan, kritik mengenai kronologi peristiwa, dan kritik mengenai kemungkinan adanya anakronisme.<sup>24</sup>

Penulis telah melakukan kritik terhadap para pengkisah, diantaranya ialah sebagai berikut:

#### **Sumber Primer Lisan**

---

<sup>23</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 68.

<sup>24</sup> Reiza D. Dienputra, *Op. cit*, 78.

- 1) K.H. Imang Abdul Hamid merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Jawami, Sindangsari, Cileunyi. Ia merupakan putra bungsu dari pendiri Pesantren Al-Jawami yang kemudian diberi amanah oleh K.H. Muhammad Sudja'i untuk menjadi penerus atau pemimpin pesantren selanjutnya. Ketika peresmian Madrasah Aliyah (MA) tahun 1977 dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 1978, K.H. Imang Abdul Hamid menjadi saksi peletakan batu pertama bersama pendiri pesantren K.H. Muhammad Sudja'i beserta menantu-menantunya. Dapat dikatakan bahwa K.H. Imang Abdul Hamid merupakan pelaku sekaligus saksi atas peristiwa peresmian MA dan MTs di Pesantren Al-Jawami. Adapun kaitannya dengan topik penelitian ini adalah MA dan MTs Al-Jawami didirikan pasca turunnya SKB 3 Menteri tahun 1975.
- 2) Bapak Ayi Muammar merupakan kepala sekolah MTs Al-Jawami sekaligus menantu pimpinan Pondok Pesantren Al-Jawami, K.H. Imang Abdul Hamid. Ia kini berusia 39 tahun. Sejak tahun 2005 bapak Ayi Muammar telah berada di lingkungan pesantren Al-Jawami yang dahulu bermula sebagai santri hingga menjadi keluarga pesantren. Adapun dalam peristiwa pendirian madrasah atau sekolah formal, bapak Ayi Muammar tidak terlibat secara langsung. Hal ini dikarenakan ia berbeda masa dengan peristiwa tersebut. Namun ia memiliki kaitan dengan topik penelitian ini, yaitu sebagai saksi sejarah perkembangan pesantren setelah berdirinya madrasah.

- 3) K.H M. Khoilullah merupakan pimpinan Pondok Pesantren Nailul Kirom, Cileunyi. Ia merupakan generasi ketiga dari pimpinan pendiri pesantren atau lebih tepatnya menantu pimpinan kedua. K.H M. Khoilullah kini berusia 52 tahun dan telah berada di lingkungan pesantren sejak tahun 1990-an yang dahulu bermula sebagai santri hingga menjadi keluarga pesantren. Adapun dalam masa stagnasi pesantren Nailul Kirom ia mendapati fakta tersebut dari K.H Agus S. Badrudin. Adapaun keterkaitan antara K.H M. Khoilullah dengan topik penelitian ini adalah sebagai saksi perkembangan pesantren Nailul Kirom.
- 4) Bapak Tutep Muhammad Mukhtar merupakan cucu pendiri Pondok Pesantren Nailul Kirom. Ia merupakan salah satu putera Kyai Agus Badruddin yang turut aktif dalam peran serta perkembangan Pesantren Nailul Kirom bersama KH. M. Kholilulloh. Bapak Tutep kini berusia 42 tahun. Menurut keluarga pesantren, bapak Tutep merupakan ahli dalam sejarah Pesantren Nailul Kirom.
- 5) Ibu Didah merupakan cucu pendiri Pesantren Al-Jawami. Secara langsung ia termasuk salah satu pengelola pesantren yaitu menjadi Kepala Sekolah MA Al-Jawami.
- 6) Ceng Uun Sulaiman Fakhturrahman merupakan cucu pendiri Pesantren Nailul Kirom. Semasa hidupnya ia menyakikan perlailah kepemimpinan sejak Kyai Naqsyabandi hingga sekarang KH. Kholil.

### **Sumber Dokumen**

- 1) Berita Acara Pemilihan Pimpinan Pondok Pesantren Pengkolan Nailul Kirom, 13 Mei 2012. Dokumen ini merupakan salah satu arsip penting dalam sejarah Pesantren Nailul Kirom. Dari segi fisik dokumen ini masih utuh dan bersih serta tidak ada cacat sama sekali.
- 2) Dokumen Hasil Musyawarah Ahli Waris H. Sulaiman Naksabandiyah Tentang Pengelolaan Pesantren, 20 Mei 1988. Dokumen ini merupakan salah satu arsip penting dalam sejarah Pesantren Nailul Kirom. Dari segi fisik dokumen ini masih utuh dan bersih serta tidak ada cacat sama sekali.
- 3) Dokumen Surat Keputusan Nomor: B.002/YPI-SULAIMANIYAH/VII/2013 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Sulaimaniyah. Dokumen ini merupakan salah satu arsip penting dalam sejarah Pesantren Nailul Kirom. Dari segi fisik dokumen ini masih utuh dan bersih serta tidak ada cacat sama sekali. Dokumen ini berisi peresmian Madrasah Diniyah (MD).

### **b. Kritik Internal**

Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui apakah sumber yang didapatkan shahih atau kredibel. Maka dari itu penulis berusaha melakukan kritik internal terhadap sumber-sumber yang ada.

### **Sumber Lisan**

- 1) K.H Imang Abdul Hamid merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Jawami yang sekarang. Ia termasuk ke dalam pelaku sejarah sehingga dapat dikatakan sebagai sumber primer lisan. K.H Imang Abdul Hamid memberikan keterangan mengenai perkembangan Pesantren sebelum dan sesudah berdirinya MA dan MTs di pesantren sebagai sekolah formal. Adapun dalam wawancara yang dilakukan dengan K.H Imang Abdul Hamid, penulis telah memperoleh data-data yang dibutuhkan yang kemudian akan di proses menuju tahapan selanjutnya yakni dalam interpretasi.
- 2) Bapak Ayi Muammar merupakan salah satu narasumber yang dapat dikatakan sebagai sumber primer lisan. Adapun dalam peristiwa pendirian madrasah atau sekolah formal, bapak Ayi Muammar tidak terlibat secara langsung. Hal ini dikarenakan ia berbeda masa dengan peristiwa tersebut. Namun ia memiliki kaitan dengan topik penelitian ini, yaitu sebagai saksi sejarah perkembangan pesantren setelah berdirinya madrasah. Kesaksiannya memberikan data-data yang penulis butuhkan karena Bapak Ayi merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh di pesantren. Kemudian kesaksiannya akan di proses menuju tahapan selanjutnya yakni dalam interpretasi.
- 3) K.H M. Khoilullah merupakan pimpinan pondok Pesantren Nailul Kirom yang sekarang. Kesaksiannya dapat dikatakan sebagai sumber primer lisan. Dalam wawancara dengan K.H M. Khoilullah, penulis

telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian akan di proses menuju tahapan selanjutnya yakni dalam interpretasi.

- 4) Bapak Tutep Muhammad Mukhtar merupakan generasi ketiga dari garis keturunan pendiri Pesantren Nailul Kirom. Kesaksiannya dapat dikatakan sebagai sumber primer lisan. Dalam wawancara dengan bapak Tutep, penulis telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian akan di proses menuju tahapan selanjutnya yakni dalam interpretasi.
- 5) Ibu Didah Faridah merupakan kepala sekolah MA Al-Jawami sekaligus cucu pendiri pesantren Al-Jawami. Kesaksiannya dapat dikatakan sebagai sumber primer lisan. Dalam wawancara dengan ibu Didah, penulis telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian akan di proses menuju tahapan selanjutnya yakni dalam interpretasi.
- 6) Ceng Uun Sulaiman Fatkhurrahman merupakan cucu dari pendiri Pesantren Nailul Kirom. Dalam wawancara dengan Ceng Uun, penulis telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian akan di proses menuju tahapan selanjutnya yakni dalam interpretasi.

### **Sumber Dokumen**

- 1) Berita Acara Pemilihan Pimpinan Pondok Pesantren Pengkolan Nailul Kirom, 13 Mei 2012. Dokumen ini berisi tentang Musyawarah pemilihan penerus pimpinan Pesantren Nailul Kirom periode ketiga setelah kepemimpinan K.H Agus S. Badrudin.

- 2) Dokumen Hasil Musyawarah Ahli Waris H. Sulaiman Naksabandiyah Tentang Pengelolaan Pesantren, 20 Mei 1988. Dokumen ini berisi tentang Musyawarah pemilihan penerus pimpinan Pesantren Nailul Kirom periode kedua setelah mengalami stagnasi.
- 3) Dokumen Surat Keputusan Nomor: B.002/YPI-SULAIMANIYAH/VII/2013 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Sulaimaniyah. Yayasan tersebut kini bernama Madrasah Diniyah (MD).
- 4) Profile Madrasah Aliyah Al-Jawami Cileunyi Bandung, Yayasan YAPATA Al-Jawami Bandung Tahun 2022/2023. Dokumen ini berisi sejarah singkat Pesantren Al-Jawami dan profile MA Al-Jawami.

### 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan selanjutnya setelah kritik sumber. Dalam tahapan ini penulis berusaha melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dari sumber lisan maupun sumber tulisan. Kuntowijoyo membagi interpretasi menjadi dua bagian, yaitu analisis dan sintesis. Analisis ialah menguraikan data-data.<sup>25</sup> Dan sintesis ialah menyatukan, yang berarti menyatukan data-data tadi hingga kemudian menjadi fakta sejarah.<sup>26</sup>

Penulis berusaha untuk memilah dan memilih serta menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh yang dianggap relevan dengan penelitian

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 78.

<sup>26</sup> *Ibid*, 80.

ini. Pada proses analisis, penulis menguraikan data-data yang berupa sumber lisan dan sumber tulisan. Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya melakukan proses sintesis yaitu mengumpulkan atau menyatukan data-data tadi hingga menjadi fakta sejarah. Hal ini Fakta-fakta tersebut kemudian penulis hubungkan dan bandingkan dengan sumber-sumber lain untuk menghindari penyimpangan atau cacat pada sumber. Maka dari itu, fakta-fakta tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah rekonstruksi sejarah yang menggambarkan bagaimana respon pesantren di wilayah Bandung Timur terhadap kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975 sejak tahun 1977-2022.

Menurut Kuntowijoyo, sejarah lisan tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam sejarah lisan, diantaranya ialah sejarah kejiwaan, sejarah keluarga, sejarah biografi kolektif, sejarah desa dan sejarah kota. Namun pada penelitian kali ini penulis hanya menggunakan sejarah keluarga dan sejarah biografi.<sup>27</sup>

Selain itu, penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teori sikap menurut Chaplin. Sikap menurutnya merupakan predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan terus-menerus untuk bertingkah laku dan bereaksi dengan cara tertentu terhadap objek, lembaga maupun persoalan tertentu. Kaitan teori dengan penelitian adalah respon maupun sikap yang diberikan Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom kemudian memberikan dampak atau perubahan yang terjadi terhadap

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 32.

lembaga keagamaan tersebut, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun segi infrastruktur.

#### 4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahapan akhir dalam metode penelitian sejarah. Dalam historiografis seorang sejarawan dituntut untuk memakai daya pikirannya dalam penulisan sejarah. Hal ini dilakukan tidak hanya pada penguasaan teknik dalam pengutipan, catatan-catatan tetapi sejarawan juga dituntut untuk berpikir kritis dan memiliki analisis yang kuat hingga akhirnya melahirkan penulisan utuh sebagai hasil dari pemikiran sintesis dari hasil penelitian dan penemuannya.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu saling membandingkan sumber-sumber yang penulis peroleh. Hingga kemudian penulis mampu mengetahui tentang respon pesantren-pesantren di wilayah Bandung timur sejak terbitnya Kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1975. Maka dari itu, penulis memiliki rencana penelitian yang berjudul “*Respon Pesantren Terhadap Kebijakan SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Kecamatan Cileunyi (1975-2022)*” yang terdiri dari empat bab.

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai prosedur awal dalam penulisan makalah. Diantaranya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Adapun

---

<sup>28</sup> Helius Sjamsudin, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), 158.

metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

BAB II berisi sejarah singkat berdirinya pesantren-pesantren yang penulis teliti. Pesantren-pesantren tersebut ialah Pesantren Al-Jawami dan Pesantren Nailul Kirom. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang latar belakang lahirnya kebijakan SKB 3 Menteri tahun 1970.

BAB III merupakan hal yang utama, yaitu berisi tentang pembahasan sebagai hasil temuan penulis dari penelitian ini. Pembahasan tersebut merupakan temuan guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebelumnya. Pembahasan tersebut sebagai hasil dari metode maupun langkah-langkah yang telah penulis lewati. Dalam bab ini terdapat dua sub bab pembahasan.

BAB IV penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atau saran bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penulis juga menyajikan beberapa hal penting yang bisa dimanfaatkan dari hasil penelitian mengenai Respon Pesantren terhadap Kebijakan SKB 3 Tahun 1975 di Kecamatan Cileunyi (1975-2022).

Daftar Pustaka, berisi tentang referensi-referensi atau rujukan yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini.

Lampiran, berisi tentang dokumen maupun arsip yang dicantumkan dalam penulisan ini